

BAB I

PENDAHULUAN

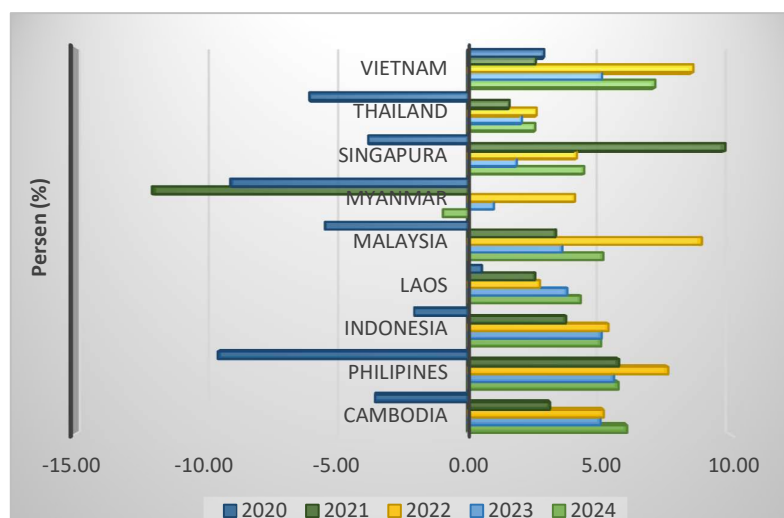
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kapasitas produksi, peningkatan pendapatan nasional, serta perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif (Sukirno 2002 dalam Suparyati, 2014). Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output, tetapi juga mencakup transformasi sosial, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta perbaikan distribusi pendapatan (Arsyad, 1999 dalam Suparyati, 2014). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata diukur dari besarnya pendapatan nasional, melainkan juga dari kemampuan suatu negara dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama yang mencerminkan keberhasilan proses tersebut karena menunjukkan meningkatnya produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi suatu negara yang tercermin melalui kenaikan Gross Domestic Product (GDP) riil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi aktivitas produksi, investasi, dan perdagangan, maka semakin besar pula nilai tambah yang dihasilkan dalam perekonomian (Sukirno 2002 dalam Suparyati, 2014). Oleh karena itu, setiap negara berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan investasi, penguatan sektor produksi, pengembangan perdagangan internasional, serta peningkatan efisiensi kebijakan ekonomi. Dalam era globalisasi, keterbukaan ekonomi dan integrasi regional menjadi faktor penting

karena memungkinkan arus barang, jasa, modal, dan teknologi bergerak lebih bebas sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di kawasan Asia Tenggara, integrasi ekonomi regional diwujudkan melalui pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu organisasi antarnegara yang memiliki dimensi geopolitik sekaligus ekonomi. ASEAN secara resmi didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, dengan tujuan utama mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya. Melalui kerja sama ini, negara anggota berupaya memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, pertanian, transportasi, komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, ASEAN juga bertujuan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi permasalahan kawasan serta memperluas hubungan dengan organisasi internasional lainnya. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai forum diplomasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi regional yang mendorong integrasi pasar dan mobilitas faktor produksi antarnegara.



Gambar 1. 1 GDP Growth ASEAN-9 tahun 2020-2024

Sumber: World Bank

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi (*GDP growth*) negara-negara ASEAN-9 selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam, terutama akibat dampak pandemi pada tahun 2020 dan proses pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi kecuali Vietnam dan Laos, dengan penurunan terdalam terjadi di Filipina dan Myanmar. Memasuki tahun 2021 hingga 2022, sebagian besar negara mulai mengalami pemulihan yang signifikan, bahkan beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam mencatat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022.

Pada periode 2023-2024, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih stabil, di mana Vietnam mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,09 persen pada tahun 2024, diikuti oleh Kamboja sebesar 6,02 persen dan Filipina sebesar 5,69 persen. Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil di kisaran 5 persen, sementara Malaysia sempat melambat pada 2023 namun kembali meningkat menjadi 5,11 persen pada 2024. Di sisi lain, Singapura dan Thailand mencatat pertumbuhan yang lebih moderat, sedangkan Myanmar kembali mengalami kontraksi sebesar -0,97 persen pada tahun 2024. Perbedaan kinerja ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi global, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing negara dalam mengelola kebijakan ekonomi dan menjaga stabilitas selama proses pemulihan, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, setiap negara berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan melalui berbagai strategi kebijakan. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas sektor produksi, penguatan investasi domestik

maupun asing, perluasan perdagangan internasional, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi. Selain itu, kerja sama ekonomi antarnegara juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan, karena integrasi ekonomi dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta mempermudah arus barang, jasa, modal, dan teknologi (Fazaalloh, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal seperti kapasitas produksi dan investasi, tetapi juga oleh keterbukaan ekonomi serta kemampuan suatu negara beradaptasi dengan sistem ekonomi global. Dalam konteks inilah kualitas kebijakan ekonomi menjadi semakin penting, terutama kebijakan yang menentukan sejauh mana aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara bebas dan efisien.

Kebebasan ekonomi pada dasarnya merujuk pada sistem yang memberikan ruang bagi individu dan pelaku usaha untuk menentukan pilihan ekonomi secara mandiri, termasuk dalam bekerja, memproduksi, berdagang, dan melakukan investasi, karena lingkungan ekonomi yang minim distorsi regulasi serta didukung perlindungan hak milik terbukti menjadi fondasi penting bagi aktivitas pasar dan pembangunan ekonomi (Hussain & Haque, 2016). Tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara sering kali tercermin melalui indikator kebebasan ekonomi yang menunjukkan seberapa ramah kebijakan pemerintah terhadap kegiatan bisnis, serta stabilitas regulasi (Brkić et al., 2020).

Dalam perspektif pembangunan, kebebasan ekonomi dipandang penting karena mampu mendorong produktivitas, inovasi, dan efisiensi kegiatan ekonomi. Selama ini banyak negara masih menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan karena peningkatan indikator tersebut mencerminkan membaiknya kapasitas produksi dan kesejahteraan ekonomi

masyarakat (Tunçsiper, 2023). Pertumbuhan ekonomi sendiri dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi suatu negara. Oleh karena itu, untuk memahami variasi pertumbuhan antarnegara, diperlukan ukuran yang mampu menangkap kualitas kebijakan ekonomi secara lebih komprehensif, salah satunya melalui pengukuran indeks kebebasan ekonomi.

Indeks kebebasan ekonomi disusun dari sejumlah indikator yang menggambarkan bagaimana kebijakan suatu negara memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Indikator tersebut antara lain mencakup *Property Rights*, *Government Integrity*, *Tax Burden*, *Government Spending*, *Business Freedom*, *Labor Freedom*, *Monetary Freedom*, *Trade Freedom*, *Investment Freedom*, dan *Financial Freedom*. Masing-masing indikator diberi skor pada rentang 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang semakin besar. Secara konseptual, indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat komponen utama, yaitu *Rule of Law*, *Government Size*, *Regulatory Efficiency*, dan *Open Markets*, yang bersama-sama mencerminkan kualitas lingkungan kebijakan ekonomi suatu negara. *The Heritage Foundation* menyusun indeks ini dengan menggabungkan berbagai sumber data internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan lembaga statistik lainnya sehingga dapat digunakan sebagai alat perbandingan lintas negara dalam menganalisis hubungan antara kebebasan ekonomi dan kinerja pertumbuhan.

Dalam kerangka *Index of Economic Freedom*, komponen *Rule of Law* menjadi fondasi utama yang mencerminkan seberapa kuat sebuah negara menjamin supremasi hukum, perlindungan hak milik, dan integritas lembaga pemerintahan sebagai dasar bagi aktivitas ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Secara

metodologis, *Rule of Law* terdiri dari dua indikator yaitu, *Property Rights* dan *Government Integrity*, yang masing-masing diukur pada skala 0-100 berdasarkan seberapa efektif hukum melindungi kepemilikan pribadi, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah, serta independensi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. *Property Rights* menilai kemampuan individu dan perusahaan untuk memperoleh, memegang, dan memanfaatkan aset yang dilindungi hukum, *Government Integrity* menilai tingkat korupsi dan transparansi yang mempengaruhi kepastian penegakan aturan.

Tabel 1. 1
Index Rule of Law Negara ASEAN-9 Tahun 2004 dan 2024

Negara	Property Rights		Government Integrity	
	2004	2024	2004	2024
<i>Cambodia</i>	30	41	30	18.6
<i>Philippines</i>	30	46.1	26	33.8
<i>Indonesia</i>	30	39.2	19	38.6
<i>Laos</i>	10	44	10	23.4
<i>Malaysia</i>	50	65.7	49	48.2
<i>Myanmar</i>	10	18	10	21.2
<i>Singapura</i>	90	94.2	93	88.3
<i>Thailand</i>	50	45	32	38.1
<i>Vietnam</i>	10	49.6	24	38.7

Sumber : Heritage Foundation

Berdasarkan Tabel 1.1 yang membandingkan skor *property rights* dan *government integrity* di negara ASEAN-9 pada tahun 2004 dan 2024, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarnegara serta perubahan dalam dua dekade terakhir. Singapura tetap menempati posisi tertinggi dengan peningkatan *property rights* dari 90 menjadi 94,2 dan meskipun *government integrity* sedikit menurun dari 93 menjadi 88,3, nilainya masih menunjukkan tingkat integritas pemerintahan yang sangat baik. Malaysia juga berada pada kategori relatif kuat dengan kenaikan *property rights* dari 50 menjadi 65,7, walaupun

government integrity sedikit menurun dari 49 menjadi 48,2. Indonesia menunjukkan perbaikan, terutama pada *government integrity* yang meningkat dari 19 menjadi 38,6, serta *property rights* yang naik dari 30 menjadi 39,2, meskipun masih berada pada tingkat menengah. Filipina, Thailand, dan Vietnam juga mencerminkan tren peningkatan, khususnya Vietnam yang mengalami peningkatan pada *property rights* dari 10 menjadi 49,6 dan *government integrity* dari 24 menjadi 38,7, menandakan adanya perbaikan kebijakan. Di sisi lain, Kamboja, Laos, dan Myanmar masih menunjukkan skor relatif rendah, meskipun beberapa mengalami peningkatan pada *property rights*, seperti Laos dari 10 menjadi 44, namun *government integrity* di negara-negara tersebut cenderung masih lemah atau bahkan menurun, seperti Kamboja dari 30 menjadi 18,6, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penegakan hukum dan kualitas tata kelola pemerintahan yang berpotensi menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum dan integritas pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan kebebasan ekonomi di ASEAN, karena kualitas kebijakan seperti rule of law, efektivitas pemerintah, dan kontrol korupsi terbukti berperan dalam membentuk stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi suatu negara. Negara dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki kepastian usaha yang lebih baik sehingga mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kharisma et al., 2025). Sebaliknya, negara dengan kualitas hukum dan tata kelola yang lemah masih menghadapi hambatan kelembagaan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi yang tinggi, dan birokrasi yang tidak efisien, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi pasar,

menghambat arus investasi, serta melemahkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional (Zakiyyah et al., 2024).

Komponen *Government Size* dalam *Index of Economic Freedom* mencerminkan sejauh mana ukuran dan peran pemerintah dalam perekonomian memengaruhi kebebasan ekonomi individu dan sektor swasta, terutama melalui kebijakan fiskal. Komponen ini terdiri dari dua indikator yaitu *Tax Burden* dan *Government Spending*. Komponen *Tax Burden* mengukur beban pajak yang ditanggung individu dan perusahaan, termasuk pajak penghasilan dan pajak tidak langsung sebagai persentase dari *Gross Domestic Product* (GDP). *Government Spending* mencerminkan beban yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah termasuk konsumsi dan transfer pembayaran yang dinilai terhadap potensinya untuk mengalihkan sumber daya dari sektor swasta dan menimbulkan distorsi alokasi sumber daya. Metodologi indeks mengasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah yang sangat besar cenderung memberi tekanan pada efisiensi pasar dan insentif investasi karena sumber daya publik harus dibiayai melalui perpajakan atau utang, sehingga dapat mengurangi ruang untuk aktivitas sektor swasta.

Tabel 1. 2
Index Government Size Negara ASEAN-9 Tahun 2004 dan 2024

Negara	Tax Burden		Government Spending	
	2004	2024	2004	2024
<i>Cambodia</i>	91.4	88.8	91	78.2
<i>Philippines</i>	77.7	78.2	88.8	79.2
<i>Indonesia</i>	77.5	81.7	84.4	90.2
<i>Laos</i>	66.4	88.8	87.1	91.2
<i>Malaysia</i>	80.9	83.9	74.2	81.4
<i>Myanmar</i>	81.9	88.5	98.7	86.3
<i>Singapura</i>	87.8	90.7	91.1	89.2
<i>Thailand</i>	75.5	81.1	91.1	80.3
<i>Vietnam</i>	63.4	80.4	82.1	87.9

Sumber : Heritage Foundation

Berdasarkan Tabel 1.2 Indeks *Government Size* di negara ASEAN-9 pada tahun 2004 dan 2024, terlihat adanya variasi kebijakan fiskal yang mencerminkan perbedaan peran pemerintah dalam perekonomian masing-masing negara. Singapura tetap mencatat skor *tax burden* tertinggi yang meningkat dari 87,8 menjadi 90,7 serta *government spending* yang relatif stabil dari 91,1 menjadi 89,2, menunjukkan ukuran pemerintah yang relatif kecil sehingga memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta. Laos dan Myanmar juga mengalami peningkatan pada *tax burden*, masing-masing dari 66,4 menjadi 88,8 dan dari 81,9 menjadi 88,5, disertai skor *government spending* yang tetap tinggi meskipun Myanmar menurun dari 98,7 menjadi 86,3, yang mencerminkan adanya perubahan struktur fiskal. Kamboja dan Malaysia menunjukkan kebijakan fiskal yang cukup stabil, meskipun Kamboja mengalami penurunan baik pada *tax burden* maupun *government spending*, sementara Malaysia meningkat pada kedua indikator tersebut. Indonesia menunjukkan peningkatan pada *tax burden* dari 77,5 menjadi 81,7 serta kenaikan *government spending* dari 84,4 menjadi 90,2, yang menunjukkan peningkatan peran pemerintah dalam perekonomian. Thailand dan Filipina berada pada tingkat menengah dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan, sedangkan Vietnam mencatat peningkatan cukup besar pada *tax burden* dari 63,4 menjadi 80,4 dan *government spending* dari 82,1 menjadi 87,9, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan fiskal.

Secara umum, perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di negara ASEAN berbeda-beda dalam memengaruhi kebebasan ekonomi. Negara dengan skor tinggi pada *Tax Burden* dan *Government Spending* umumnya mencerminkan ukuran pemerintah yang relatif lebih kecil dalam aktivitas ekonomi, sehingga secara teoritis mampu meningkatkan insentif bagi pelaku usaha untuk berproduksi

dan berinvestasi. Sebaliknya, negara dengan skor lebih rendah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kebijakan fiskalnya, baik dari sisi efisiensi pengeluaran maupun struktur perpajakan, yang dapat memengaruhi fleksibilitas pasar serta insentif sektor swasta (Thanh & Mai Hoai, 2015). Perbedaan ukuran pemerintah ini, juga mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya negara dengan pengeluaran publik yang lebih tinggi cenderung memberikan lebih banyak layanan publik dan subsidi, namun berisiko mengurangi ruang fiskal bagi sektor swasta (Dash, 2025). Hal ini menjadi penting karena kebijakan fiskal yang tepat tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daya saing nasional, kemampuan investasi domestik maupun asing, serta stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

Komponen selanjutnya dalam *Index of Economic Freedom* adalah *Regulatory Efficiency*, yang mencerminkan kualitas regulasi pasar dan sejauh mana suatu negara menciptakan lingkungan bisnis yang efisien tanpa hambatan berlebihan. Komponen ini terdiri dari tiga indikator, yaitu *Business Freedom*, *Labor Freedom*, dan *Monetary Freedom*, yang masing-masing diukur berdasarkan seberapa besar regulasi dan kerangka kebijakan mempermudah atau justru menghambat aktivitas ekonomi. *Business Freedom* menunjukkan sejauh mana regulasi dan infrastruktur mendukung proses pendirian, operasional, hingga penutupan usaha. Indikator ini mencerminkan tingkat kemudahan perizinan, beban birokrasi, serta risiko lingkungan usaha yang dapat memengaruhi perkembangan bisnis.

Sementara itu, *Labor Freedom* menggambarkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, termasuk aturan upah minimum, ketentuan pemutusan hubungan kerja, hak pekerja untuk berorganisasi, serta efisiensi pasar tenaga kerja secara umum. Serta *Monetary Freedom* berkaitan dengan stabilitas harga dan kebijakan

moneter, terutama kemampuan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali dan mencegah distorsi harga akibat intervensi yang berlebihan. Stabilitas ini penting karena memengaruhi kepastian usaha, keputusan investasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, komponen ini mencerminkan sejauh mana regulasi pemerintah mendukung atau justru membatasi kegiatan usaha dan kerja produktif dalam perekonomian.

Tabel 1. 3
Index Regulatory Efficiency Negara ASEAN-9 Tahun 2004 dan 2024

Negara	Business Freedom		Labor Freedom		Monetary Freedom	
	2004	2024	2004	2024	2004	2024
<i>Cambodia</i>	55	54.7	43.9	47.2	80.8	71.5
<i>Philippines</i>	55	69.7	53.4	57.7	77.3	65.8
<i>Indonesia</i>	55	73.1	49.1	59.3	68.9	78.4
<i>Laos</i>	40	56.2	61.3	42.4	61.6	59.1
<i>Malaysia</i>	70	70.3	72	58.1	81.8	79.1
<i>Myanmar</i>	40	39.8	20	53.2	41.6	67.9
<i>Singapura</i>	100	86.9	98.2	77.1	93	76.3
<i>Thailand</i>	70	70.3	76.8	56.4	88.9	66.7
<i>Vietnam</i>	40	73.9	64.1	54.5	80.4	69.3

Sumber : Heritage Foundation

Berdasarkan Tabel 1.3 Indeks *Regulatory Efficiency* di kawasan ASEAN-9 pada tahun 2004 dan 2024, terlihat adanya dinamika dalam kualitas regulasi usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta stabilitas moneter antarnegara. Singapura tetap berada pada posisi tertinggi meskipun mengalami penurunan pada semua indikator, dengan *business freedom* dari 100 menjadi 86,9, *labor freedom* dari 98,2 menjadi 77,1, dan *monetary freedom* dari 93 menjadi 76,3, yang tetap mencerminkan lingkungan bisnis yang sangat efisien. Indonesia dan Vietnam menunjukkan peningkatan signifikan pada *business freedom*, disertai peningkatan pada *labor freedom*, meskipun stabilitas moneter Indonesia meningkat sementara Vietnam justru menurun. Malaysia dan Thailand relatif stabil pada *business*

freedom, tetapi mengalami penurunan pada *labor freedom* dan *monetary freedom*, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam fleksibilitas tenaga kerja dan stabilitas harga. Filipina mencatat peningkatan cukup besar pada *business freedom* dan *labor freedom*, namun menurun pada *monetary freedom*. Sementara itu, Kamboja dan Laos menunjukkan perubahan yang beragam, di mana Laos mengalami penurunan cukup tajam pada *labor freedom* serta penurunan *monetary freedom*, sedangkan Kamboja relatif stagnan pada *business freedom*. Myanmar menunjukkan kondisi yang unik dengan peningkatan signifikan pada *labor freedom* dan *monetary freedom*, tetapi *business freedom* cenderung stagnan pada tingkat rendah.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi bisnis, kebijakan tenaga kerja, dan stabilitas moneter merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan investasi, efisiensi operasional perusahaan, dan kemampuan negara dalam menarik modal asing. Selain itu, perbedaan regulasi ini berdampak pada daya saing regional, karena negara dengan regulasi lebih efisien cenderung mampu menarik investor jangka panjang, memperkuat inovasi teknologi, dan meningkatkan produktivitas sektor swasta (Kamarudin et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa reformasi regulasi yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, transparansi prosedur bisnis, dan stabilitas moneter sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Komponen terakhir dalam *Index of Economic Freedom* adalah *Open Markets* yaitu aspek yang menggambarkan tingkat keterbukaan suatu negara terhadap arus barang, modal, dan layanan keuangan dalam perekonomian global. Komponen ini menunjukkan sejauh mana suatu negara mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, serta memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk

beroperasi secara kompetitif tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dengan kata lain, *Open Markets* mencerminkan seberapa terhubung perekonomian domestik dengan sistem ekonomi internasional.

Komponen ini terdiri dari tiga indikator, *Trade Freedom* menilai besar kecilnya hambatan tarif maupun non-tarif dalam kegiatan ekspor dan impor; skor yang tinggi menunjukkan bahwa arus perdagangan relatif lebih bebas sehingga barang dapat bergerak lebih mudah lintas negara. *Investment Freedom* mengukur sejauh mana suatu negara membatasi atau mempermudah pergerakan modal investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk aturan kepemilikan asing dan kontrol terhadap arus modal. Sementara itu, *Financial Freedom* menggambarkan tingkat kemandirian sektor keuangan dari intervensi pemerintah, termasuk tingkat persaingan di industri perbankan serta kemudahan akses masyarakat dan dunia usaha terhadap kredit, peningkatan daya tarik investasi asing.

Tabel 1. 4
Index Open Markets Negara ASEAN-9 Tahun 2004 dan 2024

Negara	Trade Freedom		Investment Freedom		Financial Freedom	
	2004	2024	2004	2024	2004	2024
<i>Cambodia</i>	52	70.8	50	50	70	50
<i>Philippines</i>	77	74.4	50	60	50	60
<i>Indonesia</i>	74.2	79.6	30	50	30	60
<i>Laos</i>	56.6	67.6	30	35	10	20
<i>Malaysia</i>	73.4	83	30	60	30	50
<i>Myanmar</i>	70.4	69.4	10	30	30	20
<i>Singapura</i>	85	95	90	90	70	80
<i>Thailand</i>	65.6	72.8	50	55	50	60
<i>Vietnam</i>	54.8	79.8	30	40	30	50

Sumber : Heritage Foundation

Berdasarkan Tabel 1.4 Indeks *Open Markets* di negara ASEAN-9 pada tahun 2004 dan 2024, terlihat adanya perbedaan tingkat keterbukaan ekonomi dari sisi *trade freedom*, *investment freedom*, dan *financial freedom* antarnegara. Singapura

tetap menunjukkan tingkat keterbukaan tertinggi dengan peningkatan *trade freedom* dari 85 menjadi 95, *investment freedom* yang stabil tinggi di angka 90, serta *financial freedom* yang meningkat dari 70 menjadi 80, menunjukkan perannya sebagai pusat perdagangan dan keuangan kawasan. Malaysia, Indonesia, dan Vietnam juga menunjukkan peningkatan signifikan pada *trade freedom* pada 2024, namun *investment freedom* dan *financial freedom* di ketiga negara tersebut masih berada pada tingkat menengah meskipun mengalami kenaikan. Filipina dan Thailand berada pada kategori menengah dengan *trade freedom* relatif tinggi, tetapi peningkatan pada *investment freedom* dan *financial freedom* masih terbatas. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Myanmar menunjukkan skor yang relatif lebih rendah, khususnya pada *investment freedom* dan *financial freedom* yang cenderung stagnan atau meningkat secara terbatas, seperti Kamboja yang tidak mengalami perubahan pada *investment freedom* dan justru mengalami penurunan *financial freedom*.

Selain faktor kebijakan ekonomi, investasi fisik juga memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik dan endogen, akumulasi modal fisik menjadi salah satu determinan utama peningkatan kapasitas produksi (Romer, 1986; Solow, 1956). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur investasi adalah *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) merupakan indikator makroekonomi yang mengukur akuisisi aset tetap baru oleh sektor usaha, pemerintah, dan rumah tangga seperti infrastruktur, mesin, peralatan produksi dikurangi disposisi aset lama yang sudah tidak dipakai, sehingga mencerminkan investasi (*gross fixed investment*) yang digunakan dalam produksi dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) dimasukkan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah pembentukan modal tetap mampu memperkuat hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-9. Pendekatan moderasi ini didasari oleh pemikiran bahwa kebebasan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap pertumbuhan apabila tidak diikuti oleh investasi produktif. Negara dengan kebebasan ekonomi tinggi tetapi tingkat investasi rendah mungkin tidak memperoleh manfaat pertumbuhan yang optimal. Sebaliknya, negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang baik dan tingkat GFCF yang tinggi cenderung memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat karena kondisi kelembagaan yang mendukung dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruh tiap indikatornya berbeda. Penelitian oleh (Hardi et al., 2024) dengan model pertumbuhan Solow menemukan bahwa hampir seluruh indikator kebebasan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil serupa ditunjukkan oleh (Sharma & Tokas, 2024) yang menemukan hubungan positif signifikan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan pada negara Next Eleven, terutama pada aspek sistem hukum, stabilitas moneter, dan perdagangan bebas. Penelitian (Ahmed et al., 2023) juga menegaskan bahwa beberapa indikator seperti *property rights*, *business freedom*, dan *trade freedom* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, meskipun variabel seperti *government spending*, *labor freedom*, atau *investment freedom* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, penelitian oleh (Thuy, 2022) menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi secara

umum mendorong pertumbuhan, namun beberapa indikator seperti *tax burden*, *government spending* atau *investment freedom* dapat berdampak berbeda tergantung kondisi negara. Di kawasan ASEAN sendiri, penelitian (Tran, 2019) menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi, terutama pada aspek *labor freedom* berkontribusi terhadap pertumbuhan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Sebagian besar studi terdahulu menggunakan cakupan waktu yang belum memasukkan periode terbaru, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perubahan ekonomi global, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi yang memengaruhi investasi, stabilitas pasar, serta kebijakan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Penelitian ini menjadi relevan karena kebebasan ekonomi tidak hanya mencerminkan kualitas kebijakan, tetapi juga menentukan efisiensi pasar, iklim investasi, serta kemampuan negara dalam mendorong produktivitas ekonomi. Dalam periode 2004-2024, kawasan ASEAN mengalami berbagai perubahan seperti semakin terbukanya hubungan perdagangan antarnegara, meningkatnya arus investasi, berkembangnya sektor keuangan, serta percepatan digitalisasi ekonomi yang berdampak pada kinerja ekonomi tiap negara. Perubahan tersebut menunjukkan perlunya bukti empiris yang lebih baru agar hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baik dari sisi cakupan data maupun pendekatan analisis. Dengan menggunakan

data negara ASEAN-9 hingga tahun 2024, penelitian ini mencakup periode sebelum krisis, masa pandemi, serta fase pemulihan ekonomi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis kebebasan ekonomi secara umum, tetapi juga menggunakan *Gross Fixed Capital Formation* sebagai variabel moderasi untuk melihat bagaimana investasi riil dapat memperkuat hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebagai analisis tambahan. Penelitian diharapkan ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur serta menjadi dasar pertimbangan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Indikator kebebasan ekonomi (*Economic Freedom*) manakah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selama periode 2004-2024?
- 1.2.2 Bagaimanakah peran moderasi *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh indikator kebebasan ekonomi (*Economic Freedom*) terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selama periode 2004-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Untuk menganalisis indikator kebebasan ekonomi (*Economic Freedom*) yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selama periode 2004-2024.

1.3.2 Untuk menganalisis peran moderasi *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh indikator kebebasan ekonomi (*Economic Freedom*) terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selama periode 2004-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana *Economic Freedom* beserta sepuluh indikatornya yang meliputi *Property Rights, Government Integrity, Tax Burden, Government Spending, Business Freedom, Labor Freedom, Monetary Freedom, Trade Freedom, Investment Freedom* dan *Financial Freedom* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Selain itu, dengan memasukkan *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) sebagai variabel moderasi dan analisis tambahan, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian teoritis mengenai mekanisme keterkaitan antara kualitas kebijakan, investasi fisik, dan pertumbuhan ekonomi, serta menjelaskan bagaimana investasi fisik dapat memperkuat atau memodifikasi pengaruh kebebasan ekonomi terhadap laju pertumbuhan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, perencana pembangunan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan lembaga pengambil keputusan dalam mengevaluasi peran kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan

ekonomi, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pembangunan inklusif. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana investasi fisik (GFCF) berperan dalam memoderasi hubungan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan, sehingga memberikan panduan praktis tentang kebijakan investasi publik dan privat yang dapat mendorong akumulasi modal produktif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintah, organisasi ekonomi dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif serta peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.